

**Peran Organisasi Kemanusiaan Muslim Aid dalam Menangani Kemiskinan
Di Indonesia Periode 2004 – 2018**

The Role Of Muslim Aid Humanity Organizations In Handling Poverty In
Indonesia Period 2004 - 2018

Anggi Nurul Syamsiah
20150510319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRACT

Muslim Aid is one of the Non-Governmental Organizations (NGOs) engaged in international humanitarian assistance. Muslim Aid was established in England in 1985. Muslim Aid has branches in 70 countries, one of them in Indonesia. Muslim Aid Indonesia (MAI) has been active in Indonesia since 2005, which initially served as an emergency response to the earthquake and tsunami that struck in Aceh on December 26, 2004. After the 2004 Aceh tsunami emergency, Muslim Aid began actively addressing various humanitarian issues in Indonesia, not only dealing with humanitarian issues caused by disasters, but also the problem of poverty in Indonesia. Indonesia is the fourth largest country in the world, but even though it is a large country, there is still a lot of poverty in Indonesia. Indonesia is also the country most vulnerable to natural disasters in the world. This study aims to describe the entry of Muslim Aid in Indonesia through an MoU with the government and analyze the work of Muslim Aid Indonesia in helping to deal with poverty in Indonesia. This research uses the concept of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Humanitarian Assistance. The results of this study indicate that the existence of Muslim Aid does not make poverty in Indonesia drastically decline, but with the presence of Muslim Aid Indonesia, it has helped alleviate the Indonesian government, which can reach the needs of the community more quickly, help low income people to be able to meet basic needs, as well as providing Emergency Response assistance in several affected areas.

Keywords: Muslim Aid Indonesia, Non-Governmental Organizations (NGOs), Humanitarian Assistance, MoU, emergency response, poverty, and disaster.

Abstrak

Muslim Aid adalah salah satu *Non-Governmental Organization (NGO)* yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan Internasional. Muslim Aid didirikan di Inggris pada tahun 1985. Muslim Aid memiliki cabang di 70 negara salah satunya di Inonesia. Muslim Aid Indonesia (MAI) telah aktif di Indonesia sejak 2005, yang awalnya sebagai tanggap darurat terhadap gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Pasca tanggap darurat tsunami Aceh 2004, Muslim Aid mulai aktif menangani berbagai permasalahan terkait kemanusiaan yang ada di Indonesia, bukan hanya menangani permasalahan kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana, tetapi juga masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar nomor 4 di dunia, akan tetapi walaupun termasuk negara besar, masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang paling rawan terjadi bencana alam di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masuknya Muslim Aid di Indonesia melalui MoU dengan pemerintah dan menganalisis gerak kerja Muslim Aid Indonesia dalam membantu menangani kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep *Non-Governmental Organization (NGO)* dan *Humanitarian Assistance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Muslim Aid tidak menjadikan kemiskinan yang ada di Indonesia mengalami penurunan secara drastis, namun dengan adanya Muslim Aid Indonesia telah membantu meringankan pemerintah Indonesia, yakni dapat menjangkau kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, serta memberikan bantuan-bantuan Tanggap Darurat di beberapa wilayah yang terkena bencana.

Kata kunci: Muslim Aid Indonesia, *Non-Governmental Organization (NGO)*, *Humanitarian Assistance*, *MoU*, tanggap darurat, kemiskinan, dan bencana.

A. Latar Belakang Masalah

Muslim Aid adalah salah satu *Non-Governmental Organization (NGO)* yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan Internasional dan berpusat di Inggris. Muslim Aid memiliki banyak cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia. NGO ini memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban bencana alam atau konflik atau menderita kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, diskriminasi, tunawisma, utang, pengangguran, maupun ketidakadilan. Muslim Aid didirikan di Inggris pada tahun 1985. Muslim Aid Indonesia (MAI) telah aktif di Indonesia sejak 2005, awalnya sebagai tanggap darurat terhadap gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Bantuan Muslim Aid berupa pengentasan kemiskinan dengan memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan keahlian, penggunaan air bersih, perawatan kesehatan dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan. Muslim Aid juga telah membuka cabang-cabangnya. Antara lain; di Aceh, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Jakarta. (Aid, Where We Work, 2017).

Muslim Aid merupakan lembaga bantuan sebagai proyek kerjasama antara Muslim Aid Inggris dan Muslim Aid Australia yang tetap berkomitmen membantu Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh H. Hamid Azad, Head of Overseas Programs. Menurut Hamid Azad, selama kunjungannya ke Indonesia, ia mengatakan bahwa bantuan di Indonesia ini akan bersifat jangka panjang. Muslim Aid terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan Yogyakarta pasca gempa dengan menyediakan dan menolong para korban hunian sementara (temporary shelter), rumah permanen, dan berbagai macam bantuan kemanusiaan lainnya. Kedatangan utusan Muslim Aid dari Inggris di Sabang dalam rangka menghadiri upacara penyelesaian

pembuatan sebanyak 92 rumah, dengan total bantuan sebesar 5,75 milyar Rupiah yang dilaksanakan di desa Sukakarya. (Sadzali, 2007) Dan pada tahun 2013, Muslim Aid memenangkan International Charity of the Year. (Aid, The History of Muslim Aid, 2017)

Berdirinya organisasi ini awalnya didasari oleh adanya krisis kemanusiaan di Afrika. Kemudian hingga saat ini, Muslim Aid memiliki 70 cabang di berbagai negara. Berdirinya organisasi ini tidak berjalan lancar, biasanya dalam membangun suatu badan kemanusiaan, masalah yang dihadapi adalah masalah finansial. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula donatur yang mempercayakan donasinya kepada Muslim Aid. Dengan berbagai permasalahan yang timbul tersebut, pemerintah dan masyarakat tidak mampu mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, peran Non-Governmental Organisation – salah satunya– Muslim Aid sangat dibutuhkan dalam menangani kemiskinan di Indonesia.

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian, dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen) (Statistik, Jumlah dan distribusi penduduk, 2010). Walaupun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, akan tetapi masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengulas sedikit tentang masalah kemiskinan lebih dalam, BPS melansir bahwa garis kemiskinan di Indonesia selama Maret 2016-September

2016, meningkat sekitar 2,15 persen, yaitu dari Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016 (Fauzie, 2017). Kemudian pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017. Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017) (Tabel 1.1), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Yang mana peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen (Statistik, Persentase penduduk miskin September 2017 mencapai 10,12 persen, 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa kemiskinan yang terbanyak ada di Pulau Jawa, dengan jumlah sebanyak 7,17 juta jiwa. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 34 propinsi di

Indonesia, DIY ada di urutan ke-24 alias nomor 10 dari bawah (Saptopo, 2016). Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 5,63 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,53 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 494,94 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 6,41 ribu jiwa (Statistik, Profil kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017, 2017).

Di Yogyakarta, tidak hanya masalah kemiskinan yang tinggi, akan tetapi potensi bencana alam di Yogyakarta pun relatif tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan masyarakat bahwa wilayah setempat memiliki 12 pontensi ancaman bencana alam sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan mereka (Seruji, 2017). Kemudian dalam masalah air, masyarakat Yogyakarta masih banyak mengalami kekurangan air bersih. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selain di Gunung Kidul, daerah lainnya di Yogyakarta yang terancam mengalami krisis air bersih yaitu, Bantul sebanyak 7.135 jiwa dan Kabupaten Kulon Progo ada 12.721 jiwa (Trubus.id, 2017).

Berikutnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan menjadi motor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Pada kuartal III 2016 persentase sumbangan provinsi ini

mencapai 50,8 persen. Angka ini menjadi yang terbesar dibanding Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang masing-masing hanya 14,9 dan 12,9 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan kuartal III tercatat Rp 101 triliun. Sumbangan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lain yang turut memberikan andil besar terhadap PDRB daerah adalah sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor manufaktur dan sektor konstruksi (Statistik, 50% pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi ditopang oleh Provinsi Sulawesi Selatan).

Meskipun Indonesia memiliki sekitar 74 ribu desa, dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 18% atau 18.126 desa masuk dalam kategori desa tertinggal, terbanyak di kawasan Indonesia timur. Disebut tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Ketertinggalan tersebut membuat angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut tinggi.

Berdasarkan paparan Bappenas, secara umum jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan sejak 2007 hingga 2018. Selama periode Maret 2017 – Maret 2018, tingkat kemiskinan menurun di semua provinsi kecuali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua yang justru mengalami kenaikan. Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni mencapai 27,74%, artinya lebih dari seperempat populasi di provinsi tersebut masuk kategori miskin. Angka kemiskinan provinsi paling timur Indonesia tersebut 17,92 poin persen di atas angka kemiskinan nasional 9,82% dan 24,17 poin persen di atas angka kemiskinan DKI Jakarta 3,15%. Terlihat perbedaan

mencolok atau disparitas angka kemiskinan antara Papua dan DKI Jakarta (Statistik, Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi pada Maret 2018, 2018).

Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2018 turun menjadi 9,82% dibanding posisi September 2017 sebesar 10,12% maupun Maret 2017 sebesar 10,64%. Namun, sebanyak 16 provinsi angka kemiskinannya masih di atas 10% dan juga di atas angka kemiskinan nasional. Sisanya, 18 provinsi persentase kemiskinannya di bawah angka kemiskinan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Papua merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbesar, yakni mencapai 917.630 ribu jiwa atau sekitar 27,74% total populasi. Artinya lebih dari seperempat penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibanding posisi September 2017 yang mencapai 27,76%. Di urutan kedua, Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 23,01% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,35% di posisi ketiga. Meskipun masih tinggi, namun angka kemiskinan di tiga provinsi tersebut mengalami penurunan pada Maret 2018 dibanding posisi September 2017. Guna meningkatkan pemerataan serta mengentaskan kemiskinan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur. Pembangunan yang sebelumnya terkonsentrasi di Indonesia barat kini aktivitas pembangunan dapat dilihat di seluruh nusantara. Namun, hasilnya belum terlihat karena multiplier effect dari pembangunan infrastruktur biasanya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang (Statistik, 16 Provinsi angka kemiskinannya masih di atas 10 persen, 2018).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah seiring tumbuhnya ekonomi

sekitar 5% mampu menekan angka kemiskinan. Namun, turunnya kemiskinan tersebut belum mampu menurunkan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat miskin dengan yang kaya secara maksimal. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 turun menjadi 25,95 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total populasi. Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami tren penurunan sejak krisis moneter 1998 dan mencapai level terendahnya hingga di bawah 10% untuk pertama kalinya. Namun, turunnya kemiskinan dianggap semu oleh beberapa kalangan karena ditopang oleh kurangan bantuan sosial dan bukan karena perbaikan secara struktural. Berkurangnya penduduk miskin selama ini belum mampu menekan gap antara si miskin dan si kaya secara signifikan. Data BPS menunjukkan indikator kesenjangan (rasio Gini) pada Maret 2018 sebesar 0,389. Meskipun turun dibanding posisi September dan Maret 2017, ketimpangan pengeluaran masyarakat tersebut masih jauh di atas saat terjadi krisis yang berada di level 0,308. (Baca Databoks: Berkurang 633 Ribu, Penduduk Miskin Indonesia Catat Rekor Terendah Sejak 1998) (Statistik, Berkurangnya penduduk miskin belum mampu menekan kesenjangan, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten kota di Indonesia pada 2016, rata-rata sebesar Rp 45,9 juta per kapita per tahun. Dari total 484 kabupaten kota yang berhasil didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 45 persen di antaranya kabupaten/kota berada di rentang antara Rp 25 juta - Rp 50 juta per kapita/tahun. Selebihnya, hanya sedikit kabupaten yang mencatatkan pendapatan per kapita di atas Rp 150 juta per kapita/tahun. Adapun jumlah kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita di atas Rp 200 juta hanya terdapat di 13 daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah (Statistik, Seperti apa ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota?).

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana peran Organisasi Kemanusiaan Muslim Aid dalam menangani kemiskinan di Indonesia?”**

C. Konsep Pemikiran

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif, maka konsep dirasa cukup untuk menjadi alat dalam menjawab rumusan masalah diatas. Maka akan digunakan konsep *non-governmental organization* yang tergolong ke dalam NGO yang berbasis bantuan kemanusiaan dan konsep *humanitarian assistance*.

1. Non-Governmental Organization (NGO)

a. Definisi Non-Governmental Organization

Non-Governmental Organization adalah organisasi yang bersifat privat dan *non-profit* (tidak ada keuntungan materiil) yang terlibat dalam aktivitas internasional. Mereka memiliki orientasi pada satu isu ataupun bisa saja dengan berbagai orientasi isu. Mereka pun juga dapat menekan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan secara langsung dan tidak langsung dengan teknik lobi (Pease, 2010). NGO atau yang dikenal dengan LSM juga menggagas ide-ide, menyediakan informasi, dan mempengaruhi (*lobbying*) untuk mengadakan sebuah perubahan kebijakan. David Lewis mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah *“voluntary*

associations” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik. (Lewis, 2001, hal. 30)

NGO sudah tumbuh dengan sangat pesat dan kuat. Bahkan kelompok non-profit ini dapat melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai kalangan. NGO ini merupakan sebuah organisasi yang sistem keanggotaannya tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan minimal dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi memiliki keinginan dan tujuan yang sama. (Archer, 2001, hal. 38) Jika dibandingkan dengan *International Government Organization*, NGO merupakan sebuah organisasi yang tidak cukup banyak memiliki nilai kekayaan, namun organisasi ini memiliki kemampuan dalam mengembangkan sistem sosialisasi kedalam lingkup masyarakat. NGO biasanya memiliki kemampuan lebih untuk dapat mendekati masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan dapat menerima pemikiran yang organisasi tersebut miliki. Sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional non pemerintah (INGO) jika memenuhi beberapa point penting, yaitu tidak mengandung unsur keterlibatan pemerintahan negara yang bersangkutan, memiliki tujuan global atau menyangkut lingkup hubungan internasional yang luas, memiliki sifat keanggotaan yang terbuka baik dalam melakukan rekrutmen maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok maupun organisasi lainnya, memiliki sistem kepemimpinan yang dirancang secara berkala, serta dana mobilitas organisasi berasal dari minimal tiga negara. (McLellan, 1977, hal. 16)

Istilah NGO sendiri tidak beredar secara umum sebelum dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi NGO baru menjadi populer sejak 1970-an hingga sekarang. Sangat jelas sekali, NGO haruslah berdiri secara independen dari berbagai campur tangan langsung

pemerintah. NGO juga bukan bagian dari birokrasi pemerintah, partai, perusahaan, organisasi kriminal atau kelompok gerilya. Menurut Professor Peter Willets, “*NGO is defined as an independent voluntary association of people acting together on a continuous basis, for some common purpose, other than achieving government office, making money or illegal activities.*” (Willets, 2011) (NGO didefinisikan sebagai asosiasi sukarela yang independen yang terdiri dari orang-orang bekerja bersama-sama pada landasan yang berkelanjutan, untuk beberapa tujuan yang sama, dan bukan seperti pencapaian pemerintah, ataupun yang menghasilkan uang atau aktivitas ilegal).

NGO pada perkembangannya memiliki definisi yang berbeda. Dahulunya studi NGO masih membahas NGO yang ada dalam tubuh PBB. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan NGO semakin besar dan semakin memunculkan arti lain di dalamnya.

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan oara anggota seperti yang

dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan NGO tidak hanya terjalin dengan pemerintah saja akan tetapi NGO juga dapat bekerjasama dengan kelompok organisasi lain dengan visi misi yang sama. Hubungan kerjasama antar NGO dibentuk oleh seluruh organisasi non-pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Bentuk kerjasama ini juga melibatkan beberapa institusi pemerintah Indonesia, seperti: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana daerah. Muslim Aid juga bekerjasama dengan beberapa NGO lain yaitu: Muslim Aid Australia, Global Ehsan Relief, Muslime Helfen, dan beberapa NGO lokal Indonesia seperti: Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI), Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat), Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Bakrie Amanah, The Humanitarian Forum, Bulan Sabit Merah Indonesia, Hayrat Yadrim. (Muslim Aid Indonesia, 2017)

Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan satu visi dan misi yang sama yaitu untuk menangani masalah kemiskinan dan penyebabnya serta sebagai sarana penyediaan fasilitas dasar untuk mereka yang membutuhkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama negara Muslim Aid dengan NGO internasional lain maupun NGO lokal termasuk salah satu hubungan politik Luar Negeri.

c. Pandangan NGO di dunia barat

Selanjutnya pandangan NGO di dunia barat, yang dibagi menjadi dua jenis :

1. NGO yang berorientasi pada aksi sebagai aksi atau program.

Jenis ini menjalankan program karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain-lain.

2. NGO berfungsi sebagai lembaga donor.

Jenis lembaga ini khusus menyalurkan bantuan dana kepada NGO di dunia ketiga. Dalam fungsi ini perannya memberi bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan dana atau tenaga (Friska, 2012).

Dalam hal ini Muslim Aid termasuk dalam jenis NGO yang berorientasi pada aksi sebagai aksi atau program dalam perannya memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, serta melakukan upaya dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berupa pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini Muslim Aid membawa jargon utamanya yaitu *Muslim Aid Serving Humanity*. Yang mana *Muslim Aid* ini menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Yang pada awal kerjasamanya dengan Indonesia dilakukan karena keprihatinannya terhadap terjadinya bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. (Aid, The History of Muslim Aid, 2017)

2. Humanitarian Assistance

Bantuan yang diberikan kepada suatu negara untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Bantuan dapat diberikan oleh negara atau organisasi internasional. Istilah humanitarian assistance adalah pemberian bahan makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan rehabilitasi oleh sejumlah negara dan organisasi internasional kepada Indonesia untuk mengatasi dampak bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Humanitarian assistance umumnya diberikan tanpa adanya kewajiban bagi negara penerima

bantuan untuk mengembalikan (Ashari, 2015).

Humanitarianism dalam *Journal of Humanitarian Assistance* didefinisikan sebagai kerja kemanusiaan yang berlaku lintas batas negara dengan tujuan menolong mereka yang membutuhkan. Melakukan sesuatu bagi korban bencana merupakan sebuah keharusan dan kewajiban moral. Bantuan kemanusiaan sendiri merupakan kegiatan memberikan sesuatu kepada korban bencana. Hak-hak dasar kemanusiaan yang sering kali hilang ketika terjadinya bencana menuntut adanya aksi-aksi kemanusiaan. Konsep Humanitarianism dapat dilihat dalam aplikasinya di dua kondisi yakni perang dan bencana alam (Srikandi, 2010). Meski pasca Perang Dunia II, bencana kemanusiaan akibat konflik semakin menurun, dipihak lain justru bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam semakin meningkat dengan dampak yang luar biasa besar, terutama pasca dekade 1990an. Bencana banjir, badai, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus banyak terjadi dan menelan kerugian cukup besar, baik kerugian jiwa maupun materil (Providing humanitarian aid). Bantuan kemanusiaan dengan konsep humanitarian dalam konvensi Jenewa menekankan pada usaha untuk menghilangkan penderitaan manusia yang terjadi akibat krisis atau bencana. Prinsip tersebut merupakan komitmen paling utama dalam aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam aksi kemanusiaan. Kata “bencana” sendiri merupakan kata kunci bagi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya (Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis, 2010).

Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kesiapan berbagai pihak dalam penanggulangan pascabencana. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, pemerintah nasional mempunyai tanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana alam (Crisis

Management on National and International Disaster Response). Namun selain negara, ditataran global, masalah aksi kemanusiaan diwarnai dengan kemunculan para aktor yang terdiri atas institusi negara, militer, keamanan, Non-Governmental Organization (NGO) baik ditingkat lokal maupun yang mengusung agama tertentu, hingga organisasi profesi (dokter) yang menjalankan misi kemanusiaan ke seluruh dunia. Aksi Kemanusiaan mempunyai dua dimensi yang melekat satu sama lain yaitu perlindungan terhadap manusia dan pemberian bantuan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA), lebih lanjut menjelaskan prinsip-prinsip Humanitarian sebagai basis dari setiap international humanitarian action. Prinsip-prinsip tersebut antara lain Humanity, Neutrality, Impartiality dan Independence (OCHA on Messages: Humanitarian Principles), yang merupakan gambaran dari Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip dalam kerangka kerja yang dibangun oleh Komite Internasional untuk Palang Merah Dunia (the International Committee of the Red Cross/ ICRC). Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dari kerja kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan. Pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dari respon kemanusiaan dalam penanggulangan bencana haruslah didasari oleh prinsip kemanusiaan tersebut. Untuk dapat melihat sejauh mana pemenuhan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam aksi-aksi kemanusiaan, berikut ini bentuk eksplorasi prinsip-prinsip Humanitarian tersebut.

Humanity, berarti aksi kemanusiaan mengutamakan penyelamatan kehidupan manusia dan menghilangkan penderitaan dimanapun bencana mungkin terjadi. Penderitaan yang dialami oleh korban

harus diatasi ketika ditemukan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi, dan orang tua. Oleh karena itu, pada setiap aksi-aksi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk, khususnya bagi kelompok rentan. Prinsip ini merupakan komitmen paling mendasar dari para agensi kemanusiaan dalam aksi kemanusiaannya.

Selanjutnya *Impartiality* berarti implementasi dari aksi kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi, dengan tidak mempertimbangkan kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, maupun ras, saat menolong mereka yang membutuhkan. Aksi kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kemandirian, serta memberikan prioritas kepada korban-korban dengan kondisi kritis. Bantuan kemanusiaan diharapkan dapat disuplai kepada mereka-mereka yang mendapatkan penderitaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Prinsip proporsionalitas dan prinsip nondiskriminatif diturunkan dari konsepsi HAM, sebagai dasar dan kerangka kerja untuk penilaian kebutuhan.

Berikutnya *Neutrality*, berarti aksi kemanusiaan harus tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam sebuah konflik bersenjata atau sengketa lainnya dimana aksi tersebut dilaksanakan. Agensi kemanusiaan tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama atau ideologi. Prinsip tersebut mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik. Adanya transparansi dan keterbukaan menjadi prasyarat bagi netralitas aktor kemanusiaan. Prinsip netralitas dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM.

Terakhir *Independence*, berarti aksi kemanusiaan memiliki otonomi untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan terbebas dari tujuan politik, ekonomi, militer dan tujuan-tujuan lainnya. Pada umumnya pelaksanaan aksi kemanusiaan pasti melibatkan stakeholder yaitu penerima manfaat, otoritas nasional atau lokal, donor, dan lembaga bantuan. Dalam aksi kemanusiaannya, NGO bertindak secara otonom dan bertanggung jawab kepada penerima bantuan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bersifat politis dari pendonor maupun otoritas yang ada.

Prinsip-prinsip humanitarian yang ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga kemanusiaan umumnya dijelaskan dengan definisi yang sangat umum. Bentuk operasionalisasi dari prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan agar dapat diaplikasikan dalam kajian-kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam isu tata kelola bencana. Tata kelola bencana yang diterapkan oleh aktor-aktor kemanusiaan haruslah berlandas pada keempat prinsip-prinsip Humanitarian (Isu bencana dan prinsip-prinsip humanitarian dalam studi ilmu Hubungan Internasional, 2016).

D. Hipotesis

Dengan mengaitkan pokok permasalahan dengan konsep pemikiran, maka dapat terlihat adanya sebuah hubungan dari keduanya. Sehingga berdasarkan analisis gerak kerja Muslim Aid ini, penulis mengambil hipotesis yang dilakukan Muslim Aid dalam menangani isu kemiskinan di Indonesia dengan peran:

1. Muslim Aid melakukan MoU dengan pemerintah Indonesia.
2. Muslim Aid sebagai Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di badan kemanusiaan (Muslim Aid Serving Humanity) melakukan peran sebagai Humanitarian Assistance berupa: memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan keahlian,

penggunaan air bersih, perawatan kesehatan, pengurangan risiko bencana, dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan.

E. Hasil Penelitian

1. Muslim Aid Melakukan MoU dengan Pemerintah Indonesia

Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Pemerintah/peraturan teknis lainnya yang mengatur keberadaan organisasi asing di Indonesia, mengingat keterkaitannya dengan kebijakan nasional tentang prosedur administratif keberadaan staf asing di wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini, Muslim Aid harus memenuhi kriteria kejelasan kegiatan, antara lain memiliki hubungan kemitraan dengan salah satu instansi pemerintahan di Indonesia (di bawah MoU), tidak melakukan aktivitas yang berdampak negatif bagi keadaan politik, sosial, dan keamanan Indonesia, serta sejumlah kriteria prinsip lainnya. Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Menlu RI No. SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah pada bab 3 butir 21 dijelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi, antara lain:

- 1) Politis: Tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
- 2) Keamanan: Tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- 3) Yuridis: Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah kerugian bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- 4) Teknis: Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis yang terkait,

seperti Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintah Daerah. (Multilateral, Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, 2011, hal. 8-10)

Organisasi Internasional Non Pemerintah Muslim Aid harus memenuhi beberapa kriteria ketika melakukan kegiatan di Indonesia, antara lain:

- 1) Berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia
- 2) Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia.
- 3) Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia.
- 4) Tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan.
- 5) Tidak melakukan kegiatan mengumpulkan dana (*fund rising*) di Indonesia.

Kemudian setelah semuanya terpenuhi, maka selanjutnya Muslim Aid melakukan prosedur registrasi ke Kementerian Luar Negeri. Prosedur Registrasi Berdasarkan UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kemlu merupakan gerbang utama bagi proses masuknya sebuah Organisasi Internasional Non Pemerintah di Indonesia, salah satunya yaitu Muslim Aid. Prosedur yang harus ditempuh oleh Muslim Aid adalah sebagai berikut:

- a. Muslim Aid mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah RI via Kemlu *c.q.* Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dengan melampirkan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan (*lihat di www.kemlu.go.id*). Instansi Pemerintah atau badan lain yang terkait dapat memberikan rekomendasi setelah memperhatikan surat permohonan dimaksud.
- b. Kemlu akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan

- kredibilitas Muslim Aid melalui perwakilan RI di luar negeri.
- c. Apabila dipandang layak dari segi administrasi, Kemlu kemudian mengkoordinasi rapat antar-kementerian untuk mendengarkan pemaparan rencana kerja Muslim Aid dan memberikan pandangan-pandangannya.
 - d. Forum Rapat Interkem memberikan keputusan terhadap permohonan registrasi Muslim Aid tersebut agar Muslim Aid dapat melakukan kegiatan di Indonesia. Persetujuan dan penolakan akan disampaikan secara tertulis kepada Muslim Aid tersebut.
 - e. Muslim Aid jika disetujui akan direkomendasikan bermitra dengan satu kementerian/instansi pemerintah dan harus membuat umbrella agreement kerjasama (berupa Memorandum of Understanding/MoU) dengan instansi pemerintah yang telah ditetapkan menjadi mitranya, dalam hal ini Muslim Aid bermitra dengan Kementerian Sosial.
 - f. Setelah perjanjian/MoU ditandatangani, maka Kementerian Sosial sebagai mitra akan mendaftarkan perjanjian/MoU tersebut di Sekretariat Negara. (Multilateral, Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, 2011, hal. 6-7)
Setelah prosedur-prosedur tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah proses pendaftaran Muslim Aid ke Indonesia yakni melalui Kementerian Luar Negeri. Proses pendaftarannya sebagai berikut:
 - 1) Muslim Aid Mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri *c.q.* Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Instansi/Badan/Lembaga pemerintah lain yang terkait dapat memberikan rekomendasi atas permohonan dimaksud apabila dianggap perlu.
 - 2) Kementerian Luar Negeri akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kredibilitas Muslim Aid melalui Perwakilan RI di luar negeri.
 - 3) Apabila dipandang memenuhi persyaratan secara administratif, Kementerian Luar Negeri akan mengadakan rapat antarKementerian (Interkem) untuk mendengarkan pemaparan visi, misi dan rencana kerja Muslim Aid
 - 4) Rapat antar-instansi akan memutuskan apakah organisasi internasional tersebut dapat diregistrasi dan melakukan kegiatan di Indonesia atau tidak. Persetujuan dan penolakan akan disampaikan kepada organisasi internasional yang mengajukan permohonan.
 - 5) Muslim Aid yang telah disetujui akan direkomendasikan untuk bermitra dengan satu kementerian/instansi pemerintah, yaitu Kementerian Sosial. Selanjutnya antara kementerian/instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra dan Muslim Aid harus membuat sebuah Memorandum of Understanding (MoU) sebagai umbrella agreement.
 - 6) MoU yang telah disetujui dan ditandatangani disampaikan ke Sekretariat Negara.
 - 7) Dalam hal perpanjangan ijin, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 8) Sebelum masa berlaku MoU habis, Organisasi Internasional Non-Pemerintah, Muslim Aid wajib menyampaikan permohonan perpanjangan ke kementerian/instansi mitra kerjanya.
 - 9) Kementerian Sosial dengan Muslim Aid mengadakan rapat antar-instansi untuk mengevaluasi permohonan tersebut. Rapat akan

memutuskan perpanjangan atau penolakan.

- 10) Apabila rapat mengabulkan perpanjangan, maka disusun MoU baru sesuai dengan program kerja baru. Dalam hal terjadi penolakan, maka akan disampaikan secara tertulis.

Kemudian setelah selesai dalam proses registrasi tersebut, Muslim Aid melakukan perpanjangan perjanjian bersama dengan mitra kerjanya yaitu Kementerian Sosial apabila disetujui. Perpanjangan perjanjian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum masa berlaku perjanjian selesai, Muslim Aid wajib menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama kepada instansi pemerintah yang menjadi mitranya, yaitu Kementerian Sosial.
- b. Kementerian Sosial mengadakan pertemuan antar-instansi pemerintah untuk mengevaluasi permohonan dengan mengundang Muslim Aid dan memutuskan untuk memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerjasama.
- c. Apabila forum antar-instansi memutuskan bahwa perpanjangan perjanjian kerjasama diperlukan, perpanjangan perjanjian dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jika forum antar-instansi memutuskan bahwa perjanjian kerjasama tidak diperpanjang, maka keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan. (Multilateral, Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, 2011, hal. 8)

2. Peran Muslim Aid sebagai Humanitarian Assistance dalam Menangani Kemiskinan di Indonesia

Muslim Aid sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di badan kemanusiaan (*Muslim Aid Serving Humanity*) melakukan peran sebagai *Humanitarian Assistance* berupa: memberi perhatian pada pendidikan, pelatihan keahlian, penggunaan air bersih, perawatan kesehatan, pengurangan risiko bencana, dan juga proyek-proyek peningkatan pendapatan.

Beberapa peran Muslim Aid di Indonesia dalam menangani kemiskinan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama Muslim Aid Indonesia (MAI) dengan Muslim Aid Australia (MAA)
 - a. Muslim Aid Indonesia yang didanai Muslim Aid Australia menyerahkan alat-alat produksi kepada kelompok-kelompok masyarakat di Aceh. Alat-alat produksi ini diberikan untuk memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Muslim Aid juga memberikan dukungan dalam memulai bisnis dengan penyediaan peralatan produksi. Beberapa desa yang menerima alat produksi ini adalah Desa Timbang Langsa, Desa Langsa, Desa Blang Adoe, Desa Matang Panyang dan pesantren Darul Ilmi di Aceh Timur. Muslim Aid menyediakan mesin jahit, mesin bordir tangki air, pendingin, alat berkebun dan peralatan Dapur. Kemudian dari 29 Maret 2016 - 17 April 2017 Muslim Aid Indonesia yang difasilitasi oleh Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI) membangun fasilitas air bersih, pelatihan pengembangan keterampilan dan olahraga seperti pelatihan budidaya ikan lele, pelatihan bordir, budidaya cabai dan bawang merah, pelatihan pupuk kompos, pelatihan peternakan kambing dan ayam petelur di daerah

- sekitar Aceh. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 5)
- b. Muslim Aid Indonesia didanai oleh Muslim Aid Australia, memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi penduduk desa di Blang Adoe, Aceh Utara dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pelatihan ini diadakan selama empat bulan diikuti oleh lima puluh orang. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 6)
 - c. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia memberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan tentang sablon yang diikuti oleh 17 anak dari Panti Asuhan Abdul Alim, Bantul, Yogyakarta. Pelatihan ini diadakan selama dua bulan untuk memaksimalkan keterampilan mereka dalam teknik sablon. Selain itu, peserta pelatihan juga dilatih tentang cara memasarkan produk mereka. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 7)
 - d. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia mengadakan pelatihan tentang budidaya ikan lele di Panti Asuhan Abdul Alim, Bantul, Yogyakarta dengan tujuan untuk memastikan peningkatan ekonomi di panti asuhan. Muslim Aid juga akan memberikan pelatihan pemasaran dan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Muslim Aid juga bekerja sama dengan pengusaha Rindu Syariah Yogyakarta. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 8)
 - e. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia mengadakan pelatihan keterampilan menyulam untuk warga Timbang Langsa, Aceh. Pelatihan ini diadakan selama lima hari dengan fokus utama membuat motif Pucuk Rebong. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membuat peserta pelatihan lebih mandiri dalam keberlanjutan ekonom. Dalam program ini, Muslim Aid juga bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Aceh untuk membantu para peserta di pasar dan mengembangkan produk-produk bordir mereka. Selain itu, Muslim Aid juga memfasilitasi warga dengan pelatihan lain seperti pengolahan ikan dan sertifikasi produk buatan sendiri. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 9)
 - f. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia mengadakan pelatihan bertani telur yang komprehensif bagi para siswa. Pelatihan berlangsung di Pesantren Bustanul Ilmi, Aceh Timur. Muslim Aid Indonesia didukung oleh Departemen Peternakan Aceh Timur. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melatih para siswa membuat kandang, pemeliharaan hewan, obat-obatan / vitamin, mencegah & mengelola penyakit ternak, mengelola sanitasi, manajemen, dan pemasaran produk ternak. Pelatihan ini dilakukan karena mengenai peluang pasar, Kabupaten Ranto Seulamat ini mempunyai potensi besar bagi pertumbuhan peternakan unggas. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 10)
 - g. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia membangun fasilitas air bersih yang menyediakan 18.000 liter air bersih setiap hari. Program ini dilakukan untuk mengatasi krisis air di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta. Proyek ini dilakukan di lima desa di Lombok Timur. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 13)

- h. Muslim Aid Indonesia bekerja sama dengan Muslim Aid Australia dalam rangka pembangunan sumur di empat desa. Ratusan penduduk di Bantul, Yogyakarta mendapat manfaat dari fasilitas air bersih yang baru ini. Ketentuan ini merupakan bagian dari program Muslim Aid Indonesia, bekerja sama dengan Muslim Aid Australia. Dalam dua bulan, Muslim Aid telah menyelesaikan pembangunan di desa Pungkuran dan Desa Patalan, masing-masing dua unit, dan satu unit sumur di desa Kepuh dan desa Sareyan. Sementara itu, Muslim Aid dan Dinas Kesehatan setempat masih menguji kualitas air, khususnya untuk konsumsi. Yang mana uji kesehatan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warga setempat. Jika hasilnya tidak memadai karena tingginya tingkat E-coli, Muslim Aid akan melakukan perawatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Muslim Aid Indonesia memilih empat desa untuk program karena tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah-daerah tersebut, yang melarang mereka membangun sumber air mereka sendiri secara mandiri. (Muslim Aid Provides the Residents of Bantul, Yogyakarta With Clean Water Facilities, 2015)
- i. Muslim Aid Indonesia yang didanai Muslim Aid Australia sejak 2014, berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan dasar bagi anak yatim yang ikut serta dalam program Bantuan Anak Yatim. Hingga Januari 2017, Muslim Aid Indonesia terus memantau kesehatan, gizi dan pendidikan anak-anak yatim. Sebagai bagian dari upaya Muslim Aid Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung dan menindaklanjuti program untuk 111 anak yatim di Yogyakarta. Fokus utama adalah untuk memperkuat kualitas kesehatan dan pendidikan di antara mereka yang membutuhkan. Selain itu, Muslim Aid bekerja sama dengan Klinik Naura Husada juga untuk memfasilitasi anak-anak yatim dengan mengadakan pemeriksaan gigi gratis. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 22)
- j. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslim Aid Australia telah menyelesaikan 60 sumur air dan 10 sistem air di Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta. Di NTB, sebanyak 11 sumur air telah digunakan di masjid-masjid dan mushala oleh penduduk. Di Yogyakarta, sebanyak 12 sumur air sudah digunakan di Pondok Pesantren dan juga 2 sistem air telah dipasang di Gunung Cilik, Muntuk, Dlingo, kabupaten Bantul dan Danyangan, Pilangrejo, Nglipar, serta kabupaten Gunung Kidul. Sehingga sekitar 1995 rumah tangga telah menerima akses air bersih yang mudah. Program WASH (Water, Sanitation and Hygiene Promotion) MAI mendukung Tujuan Pembangunan Milenium PBB (MDG) dengan memberikan anak-anak sumber air yang berkelanjutan, mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh kehausan dan kelaparan, menyediakan air bersih untuk pertanian yang menyediakan solusi berkelanjutan dan subur bagi banyak rumah tangga dan lingkungan dan menyediakan akses ke air bersih untuk pertanian yang menyediakan makanan untuk masyarakat. (Muslim Aid Indonesia, 2016, hal. 7)
2. Kerjasama Muslim Aid Indonesia dengan Muslime Helfen (Jerman)
- a. Muslim Aid Indonesia yang didanai oleh Muslime Helfen (Jerman) memberikan modal usaha bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil dan menengah baru di Yogyakarta. Modal bisnis yang

disediakan beragam, mulai dari produksi kue, laundry, peternakan kambing dan ayam hingga menjahit. Muslim Aid dan Muslime Helfen berfokus pada masyarakat rentan di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. (Muslim Aid Indonesia, 2017, hal. 11)

- b. Muslim Aid Indonesia bekerjasama dengan Muslime Helfen (Jerman) mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkualitas bagi ibu hamil dan bawah lima tahun (Balita) di Lombok Timur. Program ini dilaksanakan demi mencegah ibu hamil dan balita mudah terserang penyakit. Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Sentra Medika, Selong, Lombok Timur, selama lima hari. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter spesialis anak. Program ini fokus ke dua desa, yakni Desa Ketapang Raya dan Desa Tanjung Luar. (Pelita Banten, 2018)
3. Kerjasama Muslim Aid Indonesia dengan Global Ehsan Relief

Muslim Aid Indonesia didanai Global Ehsan Relief mendistribusikan paket makanan ke desa Blang Adoe dan Matang Panyang yang berlokasi di Aceh Timur. Melalui Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI) Muslim Aid menyoal orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, difabel dan manula. Desa Blang Adoe dan Desa Matang dikenal sebagai desa yang dekat dengan kamp Rohingya. Bantuan Muslim Aid memilih desa-desa karena kurangnya bantuan kepada penduduk setempat sementara semua masyarakat fokus pada pengungsi Rohingya. Program ini diadakan selama bulan Agustus - September 2016. Sekitar 150 rumah tangga menerima manfaatnya. (Muslim Aid Indonesia, 2016, hal. 25)

4. Kerjasama Muslim Aid Indonesia dengan Muslim Aid UK, Muslim Aid USA, dan The World Federation-Aid

Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI) didukung oleh Muslim Aid UK, Muslim Aid USA dan WF-Aid membangun 155 unit rumah hunian sementara di Lombok Utara. Hal ini merupakan solusi untuk membantu korban gempa di Lombok yang kehilangan tempat tinggal. Hunian ini berukuran 6×4 meter. Berpondasi kayu dengan dinding anyaman bambu dan beratapkan spandek. Terdapat fasilitas satu kamar tidur dan satu ruang keluarga. Selain membangun rumah hunian sementara, YKMI juga membangun sarana air bersih, mendistribusikan hygiene kit, terpal, tikar dan sembako untuk para pengungsi disaat waktu tanggap darurat bencana berlangsung. (Pelita Jakarta, 2019)

5. Kerjasama Muslim Aid Indonesia dengan NGO Lokal

- a. Muslim Aid Indonesia bekerjasama dengan Koperasi Jasa Sumber Banyu Towo dalam upaya menyediakan pasokan air bersih dan aman bagi masyarakat di 8 desa dan memfasilitasi pasokan air kepada masyarakat. Muslim Aid Indonesia menyediakan pasokan air dan instalasi perpipaan untuk penduduk desa di Kecamatan Paranggupito di Jawa Tengah, yang bermanfaat bagi lebih dari 20.000 orang di daerah. Sumur bor tersebut dibangun di sekitar aliran sungai dengan kedalaman sekitar 60 meter, yang mana Desa Paranggupito ini memiliki tanah berbatu yang merupakan tempat yang sulit untuk mengambil air. Kegiatan ini bekerjasama dengan Koperasi Jasa Sumber Banyu Towo (organisasi lokal yang didirikan oleh masyarakat setempat). Penandatanganan MoU dilakukan pada 13 Mei 2014. Ini menggabungkan koordinasi dengan pemimpin lokal, mitra dan pemerintah daerah di Paranggupito-Wonogiri.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan program ini meliputi pembangunan menara air, instalasi pipa utama, dan instalasi distribusi yang meliputi panel listrik dan instalasi kabel, pompa *submersible* untuk sumur bor dan rumah panelnya, perpipaan air, 2 unit menara air beton dibangun dengan masing-masing ukuran 12 meter kubik, generator dengan kapasitas 15 kw untuk mengalirkan air karena daya listrik tidak cukup, pipa distribusi untuk mengalirkan air ke rumah masyarakat dan meter air ke setiap rumah pengguna untuk mengontrol penggunaan air dan mengukur kontribusi setiap rumah untuk biaya pemeliharaan dan operasional. Untuk memastikan hasil yang menguntungkan, program pemantauan dilakukan dua kali: 11 Juni dan 20 September di mana kegiatan kemajuan mencapai sekitar 100 persen. Instalasi yang berhasil telah diselesaikan, yang terdiri dari pompa selam di dalam sumur bor, panel listrik, konstruksi rumah panel, konstruksi tangki air, generator dengan kapasitas 15 kw, pipa utama dan instalasi pipa distribusi air, serta meter air. Finalisasi kegiatan ini memungkinkan masyarakat di empat dusun dapat mengakses pasokan air bersih dan aman. Kegiatan ini juga mendukung pengaturan dan pengembangan kapasitas komite air setempat untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas pasokan air melalui pelatihan dan bantuan teknis. Selain itu, Muslim Aid juga mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi air dan sanitasi di masyarakat sasaran untuk memastikan keberlanjutan program. (Aid, Water Supply and Piping Installation Provision/Aquifer Storage and Recovery (Central Java), 2015)

b. Muslim Aid bekerjasama dengan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI) dan Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mendistribusikan kebutuhan hunian untuk para korban gempa dan

tsunami di Sulawesi tengah. Kebutuhan utama yang didistribusikan ialah terpal, lampu pijar tenaga matahari, kelambu, matras tidur dan tenda. YKMI telah membagikan sebanyak 66 tenda keluarga, 126 kelambu, 235 matras tidur, 132 solar lamps, dan terpal sebanyak 200 buah. Jumlah penerima manfaat ada sekitar 266 orang. Sebelumnya, YKMI bekerjasama dengan UNHCR juga telah mendirikan sebanyak 705 tenda keluarga yang kini telah dihuni 2820 orang. (Dwi, 2018)

c. Muslim Aid Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI) untuk membuat lubang pelatihan pengolahan makanan bagi perempuan di desa Timbang Langsa, Aceh. Pelatihan ini bertujuan untuk membuat para wanita lebih mandiri. Program pelatihan ini didedikasikan untuk desa-desa yang terletak di dekat kamp pengungsi Rohingya. Tidak hanya pelatihan pengolahan makanan, tetapi Muslim Aid Indonesia juga mengadakan gerakan hijau dengan menanam 2.000 pohon mahoni, mangga, rambutan dan durian di sekitar kamp. Kegiatan ini juga didukung oleh Muslim Aid Australia dan Departemen Perikanan dan Pertanian Laut. (Muslim Aid Indonesia, 2016, hal. 17)

d. Muslim Aid bekerjasama dengan LPM Dompot Dhuafa dalam rangka menyalurkan hewan kurban di 5 (Lima) titik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam program “Qurbani Programme”. Penyaluran hewan kurban tersebar di 2 (dua) Kabupaten/Kota di NTT, yaitu Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. (Nugraha, 2016)

6. Kerjasama Muslim Aid Indonesia dengan Pemerintah Indonesia

- a. Pada bulan Februari 2014, Muslim Aid Indonesia bersama dengan pusat erupsi / satlak, militer dan Urusan Sosial, memberikan tanggap kepada korban dari letusan di Kelud Gunung, Jawa Timur. Muslim Aid menyediakan bantuan berupa makanan dan non-makanan. Distribusi makanan dan non bantuan makanan diberikan kepada 5 pusat pengungsi di Wates, Kepung dan Puncu kabupaten dengan 3.400 pengungsi di wilayah tersebut. Item makanan termasuk: lauk pauk, bumbu dapur, mie instan, minyak goreng, dan lain-lain, sementara barang bukan makanan termasuk: selimut, tikar, kebutuhan bayi, minyak kayu putih, handuk, pakaian dalam, dan sebagainya. (Muslim Aid Indonesia, 2013, hal. 9)
- b. Muslim Aid Indonesia bekerja sama dengan Biro Kesehatan Lombok Timur, mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pelatihan ini diadakan di desa Masbagik Utara di Lombok Timur. Selain pelatihan, Muslim Aid Indonesia juga mendistribusikan makanan tambahan bergizi tinggi untuk wanita hamil dan balita.
Untuk Lombok Timur, MAI memusatkan program ini di lokasi-lokasi dengan indikator kesehatan terburuk dan tingkat kematian ibu dan ibu tertinggi, seperti Kabupaten Masbagik Desa Baru; Masbagik, kecamatan Desa Sikur; Sikur, kecamatan Desa Greneng; Sakra Timur dan Desa Mamben Lauk, distrik Wanasaba. (Muslim Aid Indonesia, 2016, hal. 8)
- c. Muslim Aid Indonesia bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kabupaten (BPBD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul Mengadakan Pelatihan tentang manajemen risiko bencana dan pertolongan pertama kepada masyarakat dan sekolah. Muslim Aid juga melakukan gerakan ke saluran air bersih di desa Baros dan Hargotirto dan juga menyediakan alat manajemen risiko bencana seperti *walkie-talkie* dan gergaji di Karang Tengah. (Muslim Aid Indonesia, 2016, hal. 13)
- d. Muslim Aid Indonesia Yogyakarta dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengadakan pelatihan untuk Desa Tangguh Bencana (Destana) Tirtohargo, Kecamatan Kretek Bantul. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Tirtohargo, mengikuti pelatihan dengan tema “Penguatan dan Peningkatan Ketangguhan Masyarakat melalui Pengurangan Risiko Bencana dan integrasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia” untuk wilayah Kabupaten Bantul. Desa Tirtohargo sendiri, merupakan salah satu desa yang telah menyandang predikat desa tangguh bencana sejak tahun 2013, dengan potensi ancaman utama bahaya Tsunami yang berasal dari Samudera Hindia. (BPPD Kabupaten Bantul, 2016)
- e. Muslim Aid Indonesia memberikan bantuan dalam menangani para pengungsi dari Rohingya yang terdampar di Aceh. Konflik Agama di Rohingya, Myanmar antara Muslim dan Buddha menyebabkan beberapa pengungsi dari Rohingya terdampar di Aceh pada April 2013. Muslim Aid bekerjasama dengan *Sosial Agency* dan TAGANA dan juga dengan Departemen Imigrasi dan Polisi tentang penyediaan keamanan, layanan kesehatan dan makanan sesuai dengan standar

Tanggap Darurat. Selain itu, Bantuan Muslim juga diserahkan lebih dari 74 pasang sandal dan 1 pasang tongkat untuk pria tertua, dan memasang 1 pc Tangki Air 2.000 L ditambah 1 unit Pompa Air. (Muslim Aid Indonesia, 2013, hal. 9)

F. Kesimpulan

Skripsi ini menjelaskan tentang peran Muslim Aid dalam menangani kemiskinan di Indonesia periode 2004 – 2018 dengan menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) dan *Humanitarian Assistance*. Konsep NGO diaplikasikan dalam hal Muslim Aid melakukan MoU dengan pemerintah Indonesia, sedangkan aplikasi dari konsep *Humanitarian Assistance* digunakan dalam menganalisis peran-peran Muslim Aid Indonesia dalam membantu masyarakat Indonesia yang mengalami kemiskinan baik karena kurangnya bahan makanan ataupun karena bencana alam. Dari penelitian yang penulis lakukan dari periode 2004 – 2018 tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia ternyata tidak mengalami penurunan secara drastis, namun dengan adanya salah satu NGO yaitu Muslim Aid Indonesia telah membantu meringankan pemerintah Indonesia, yang dengan adanya NGO ini dapat menjangkau kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, serta memberikan bantuan-bantuan Tanggap Darurat di beberapa wilayah yang terkena bencana, seperti di wilayah Desa Blang Adoe di Aceh Utara, dimana Muslim Aid mengadakan pelatihan kewirausahaan tentang pembuatan pupuk kompos, budidaya cabai dan bawang merah, yang mana dengan adanya pelatihan ini dapat mengembangkan potensi penduduk, menciptakan pekerjaan baru, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa Blang

Adoe. Di desa Blang Adoe dan Matang Panyang yang berlokasi di Aceh Timur, Muslim Aid Indonesia juga mendistribusikan paket makanan. Muslim Aid menyasar orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, difabel dan manula. Sasaran bantuan ini adalah untuk masyarakat yang dekat dengan kamp Rohingya. Bantuan Muslim Aid memilih desa-desa karena kurangnya bantuan kepada penduduk setempat sementara semua masyarakat fokus pada pengungsi Rohingya. Adanya program ini, 150 rumah tangga menerima manfaatnya.

Kemudian di Kecamatan Ranto Seulamat, Aceh Timur, Muslim Aid Mengadakan Program Pelatihan Bertani Telur untuk Siswa di pesantren. Pelatihan ini dilakukan karena mengenai peluang pasar, Kabupaten Ranto Seulamat ini memiliki potensi besar bagi pertumbuhan peternakan unggas. Pelatihan ini juga didukung oleh departemen peternakan di Aceh Timur, untuk melatih para siswa membuat kandang, pemeliharaan hewan, obat-obatan / vitamin, mencegah & mengelola penyakit ternak, mengelola sanitasi, manajemen, dan pemasaran produk ternak. Adanya pelatihan ini peserta berhasil memanen ratusan telur, dan siswa juga menjual hasil panen ke toko-toko di sekitar pesantren sehingga siswa-siswa tersebut dapat memperoleh penghasilan tambahan.

Di Yogyakarta, khususnya di wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, Muslim Aid Indonesia dan Muslime Helfen (Jerman) memberikan modal usaha untuk memulai usaha kecil dan menengah baru di Yogyakarta. Modal bisnis yang disediakan beragam, mulai dari produksi kue, laundry, peternakan kambing dan ayam hingga menjahit. Dan menurut laporan dari Koordinator Muslim Aid, ada sekitar 136 rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari program ini. Dan masyarakat yang terbantu dalam

membangun usaha kecilnya tidak khawatir mendapatkan pinjaman dari bank karena modal semuanya diberikan secara gratis oleh Muslim Aid Indonesia.

Di desa Lombok Timur, NTB, Muslim Aid Indonesia didanai oleh Muslim Aid Australia membangun fasilitas air bersih yang menyediakan 18.000 liter air bersih bagi masyarakat Lombok Timur. Proyek ini dilakukan di lima desa di Lombok Timur. Menurut laporan dari Koordinator Muslim Aid dan beberapa tim di lapangan, mencatat ada sekitar 5.723 orang di lima desa mendapat manfaat dari proyek ini sehingga warga dari Desa Kembang Kuning dapat dengan mudah mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya Muslim Aid Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung dan menindaklanjuti program untuk 111 anak yatim di Yogyakarta. Dalam hal ini ada 111 anak yatim yang mendapatkan manfaat kesehatan dan pendidikan karena fokus utama adalah untuk memperkuat kualitas kesehatan dan pendidikan di antara mereka yang membutuhkan. Selain itu, Muslim Aid juga bekerja sama dengan Klinik Naura Husada untuk memfasilitasi anak-anak yatim dengan mengadakan pemeriksaan gigi gratis.

Di Yogyakarta dan NTB, Muslim Aid Indonesia mendistribusikan 16 sapi di daerah yang terpencil. Strategi ini untuk mencegah penyebaran daging di wilayah kota. Beberapa daerah terpencil di Yogyakarta yaitu Kulon Progo dan kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat adalah kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan laporan dari Koordinator Muslim Aid Yogyakarta, adanya program ini memberikan manfaat kepada 2000 rumah tangga. Rumah tangga ini dipilih berdasarkan beberapa kategori, termasuk mereka yang miskin, yatim piatu, janda, lanjut usia, dan cacat.

Di Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta, Muslim Aid Indonesia menyalurkan 60 sumur air dan 10 sistem Air. Di NTB sebanyak 11 sumur air telah digunakan di masjid-masjid dan mushala oleh penduduk. Sedangkan di Yogyakarta sebanyak 12 sumur air sudah digunakan di beberapa Pondok Pesantren dan juga 2 sistem air telah dipasang di beberapa desa wilayah kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Dengan adanya bantuan ini, sekitar 1995 rumah tangga menerima akses air bersih yang mudah. Program ini mendukung tujuan Pembangunan Milenium PBB (MDG) dengan memberikan anak-anak sumber air yang berkelanjutan, mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh kehausan dan kelaparan, menyediakan air bersih untuk pertanian yang menyediakan solusi berkelanjutan dan subur bagi banyak rumah tangga dan lingkungan dan menyediakan akses ke air bersih untuk pertanian yang menyediakan makanan untuk masyarakat.

Di Pidie Jaya, Aceh, Muslim Aid Indonesia mendistribusikan bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air mineral, dan perlengkapan kesehatan untuk para pengungsi. Fokus dari program ini adalah penyediaan air bersih untuk penduduk yang terkena dampak dan distribusi peralatan kebersihan untuk keluarga yang membutuhkan. Distribusi dilakukan di antara 8.234 orang di 8 desa di tiga kecamatan di Pidie Jaya.

Kemudian selama bulan Ramadhan di tahun 2016 di Aceh, Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah Jabodetabek, Muslim Aid mendistribusikan iftar (buka puasa), zakat, dan paket makanan selama ramadhan di Indonesia. Menurut laporan dari Country Director Muslim Aid Indonesia, Mahfuzur Rahman, ribuan orang mendapat manfaat dari program tersebut, mengingat daya beli masyarakat

sangat rendah, sementara harga naik selama bulan suci Ramadhan.

Muslim Aid Indonesia juga mendistribusikan ratusan ternak pada hari perayaan Idul Adha 1437 H/2016 M. Sebanyak 147 sapi didistribusikan ke sepuluh provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2016 Muslim Aid Indonesia juga mendistribusikan 3.010 ternak kalengan, yang telah didistribusikan ke Sumatera Utara dan Papua. Target untuk program ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, distribusi daging tidak hanya menumpuk di wilayah kota. Mengenai jumlah penerima manfaat, Country Director Muslim Aid Indonesia melaporkan bahwa dengan adanya program ini ada sekitar 11.025 keluarga yang mendapatkan manfaat.

Di Aceh, terutama di Kota Lhok Sukon, Aceh Utara dan Kota Bayeun, Aceh Timur, Muslim Aid Indonesia mendistribusikan makanan dan non-makanan ke ribuan pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh. MAI mendistribusikan air minum, menyediakan penyediaan air bersih di tempat penampungan untuk semua pengungsi serta sukarelawan, perlengkapan mandi, dan pakaian untuk pengungsi wanita, laki-laki, dan anak-anak. Hampir 600 orang telah dicakup oleh program ini. Selain itu, dalam menyambut bulan Ramadhan di Aceh, MAI juga mendistribusikan paket makanan, termasuk beras, minyak goreng, margarin, susu, gula, sirup, dan kurma. Adanya program ini, lebih dari 550 keluarga di delapan desa menerima paket-paket bantuan tersebut.

Di Timor Timur, Nusa Tenggara Barat, Muslim Aid Indonesia bekerja sama dengan Muslim Aid Australia menyediakan penyediaan air bersih dengan membangun tiga sumur di Desa

Loyok, Kecamatan Sikur. Program ini bertujuan untuk membantu warga dan lembaga pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Selain sumur, MAI juga menyediakan pompa dan tangki air untuk memastikan kualitas air yang baik bagi warga. Mengenai jumlah warga yang mendapat manfaat dari program ini, petugas lapangan Muslim Aid Indonesia melaporkan bahwa ada 412 orang yang dapat memperoleh manfaat dari program air bersih ini.

Daftar Pustaka

- 23-26, A. A. (2016). Isu bencana dan prinsip-prinsip humanitarian dalam studi ilmu Hubungan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*, 5, 23-26.
- Aid, M. (2015, Februari 19). *Water Supply and Piping Installation Provision/Aquifer Storage and Recovery (Central Java)*. Retrieved from <http://www.muslimaid-id.org/water-supply-and-piping-installation-provision-aquifer-storage-and-recovery-central-java/>
- Aid, M. (2017). The History of Muslim Aid. <https://www.muslimaid.org/about-us/the-history-of-muslim-aid/?&p=0>, 1-4.
- Aid, M. (2017). The History of Muslim Aid. <https://www.muslimaid.org/about-us/the-history-of-muslim-aid/2004/>.
- Aid, M. (2017). Where We Work. <https://www.muslimaid.org/what-we-do/where-we-work/indonesia/>.
- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.
- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis. (2010). <http://politik.lipi.go.id/in/kegiatan/tahun-2010/342focus-group-discussion-bencana-ditinjau-dariaspek-pengetahuan-dan-praktis.html>.
- BPPD Kabupaten Bantul. (2016, 3 23). *Muslim Aid Perkuat Destana Tirtohargo Hadapi Perubahan Iklim*. Retrieved from <https://bpbdbantulkab.go.id/muslim-aid-perkuat-destana-tirtohargo-hadapi-perubahan-iklim/>
- Crisis Management on National and International Disaster Response. (n.d.). <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/aksikemanusiaan/52-crisis-management-on-national-and-international-disaster-response-.html>.
- Dwi, F. (2018, 11 28). *YKMI Salurkan Bantuan Kebutuhan Hunian Untuk Korban Tsunami Palu*. Retrieved from <http://jogjakartanews.com/baca/2018/11/28/4895/ykmi-salurkan-bantuan-kebutuhan-hunian-untuk-korban-tsunami-palu>
- Fauzie, Y. (2017). Jumlah Penduduk Miskin Berkurang, Tapi Kesenjangan Tinggi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170103172141-92-183822/jumlah-penduduk-miskin-berkurang-tapi-kesenjangan-tinggi>.
- Friska, M. (2012). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Skrispi*, 33.
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- McLellan, D. S. (1977). *The Theory and Practice of International Relation*. New Delhi: Prentice Hall.
- Multilateral, S. D. (2011). Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Multilateral, S. D. (2011). Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Muslim Aid Indonesia. (2013). Eruption in Gunung Kelud (East Java). *2013-2014 Annual Report Indonesia Field Office*, 9.
- Muslim Aid Indonesia. (2013). Rohingya Refugees. *2013-2014 Annual Report Indonesia Field Office*, 9.
- Muslim Aid Indonesia. (2016). 60 Water Wells and 10 Water System for NTB and Yogyakarta. *Annual Report 2016 Indonesia Field Office*.

- Muslim Aid Indonesia. (2016). Food Aid Distribution For the Local Residents. *Annual Report 2016 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2016). Independence Through Economic Empowerment. *Annual Report 2016 Indonesia Field Office*, 17.
- Muslim Aid Indonesia. (2016). Tens of Community Health Workers Provided Mother And Child Health In East Lombok. *Annual Report 2016 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2016). Training on DRR management and First Aid to the Community and Schools. *Annual Report 2016 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). 3. Developing Entrepreneurship, Muslim Aid Held Screen Printing Training for Orphanage in Bantul. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*, 7.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Annual Report 2017 Indonesia Field Office. 27.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Building Small Businesses for Financial Independence. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Driving Small Businesses with Production Tools, and Capital Support . *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*, 5.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Embroidery Skill Training For Timbang Langsa Residents. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*, 9.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Entrepreneurship Training for Blang Adoe Village in North Aceh. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*, 6.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Health and Education Support For Hundreds of Orphans in Yogyakarta. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Muslim Aid Build Clean Water Facility for a Thousand Residents in West Nusa Tenggara and Yogyakarta. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Muslim Aid Holds an Egg Farming Training Programme for Students in Aceh. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*.
- Muslim Aid Indonesia. (2017). Muslim Aid Trains Orphans in Bantul with Fish Farming Technique. *Annual Report 2017 Indonesia Field Office*, 8.
- Muslim Aid Provides the Residents of Bantul, Yogyakarta With Clean Water Facilities. (2015, Mei 9). Retrieved from <http://www.muslimaid-id.org/muslim-aid-provides-the-residents-of-bantul-yogyakarta-with-clean-water-facilities/>
- Nugraha, F. S. (2016, 10 4). *Salurkan Kurban di Daerah, Muslim Aid Gandeng Dompot Dhuafa*. Retrieved from <http://www.kbknews.id/2016/10/04/salurkan-kurban-di-daerah-muslim-aid-gandeng-dompot-dhuafa/2/>
- OCHA on Messages: Humanitarian Principles. (n.d.). <https://docs.unocha.org> .
- Pease, K.-K. S. (2010). In *International organizations perspective on governance in the twenty-first century*. New York: Pearson Education.
- Pelita Banten. (2018, 11 14). *Pelayanan Kesehatan Berkualitas Bagi Ibu dan Anak di Lombok Timur*. Retrieved from <https://www.pelitabanten.com/35751/2018/11/14/pelayanan-kesehatan-berkualitas-bagi-ibu-dan-anak-di-lombok-timur/>
- Pelita Jakarta. (2019, 1 10). *YKMI Bangun 155 Rumah Hunian Sementara di Lombok*. Retrieved from <https://www.pelitajakarta.com/3640/2019/01/10/ykmi-bangun-155-rumah-hunian-sementara-di-lombok/>
- Providing humanitarian aid. (n.d.). www.usaid.org .
- Sadzali, A. (2007). Muslim Aid tetap komitmen bantu Indonesia. <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/06/12/41278/muslim-aid-tetap-berkomitmen-bantu-indonesia.html>.

- Saptopo, I. B. (2016). Masalah kemiskinan di DIY. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial “BK3S” Daerah Istimewa Yogyakarta. . http://bkksey.org/td_d_slug_8/.
- Seruji. (2017). BPBD ingatkan 12 potensi ancaman bencana di Yogyakarta. <https://seruji.co.id/daerah/jateng-diy/bpbd-ingatkan-12-potensi-ancaman-bencana-di-yogyakarta/>.
- Srikandi, A. G. (2010). Comprehensive Security and Humanitarian Action. *Multiversa: Journal of International Studies No. 1*.
- Statistik, B. P. (2010). Jumlah dan distribusi penduduk. <https://sp2010.bps.go.id/>.
- Statistik, B. P. (2017). Profil kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017. <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>.
- Statistik, B. P. (2018). 16 Provinsi angka kemiskinannya masih di atas 10 persen. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/17/16-provinsi-angka-kemiskinannya-masih-di-atas-10-persen>.
- Statistik, B. P. (2018). Berkurangnya penduduk miskin belum mampu menekan kesenjangan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/20/berkurangnya-penduduk-miskin-belum-mampu-menekan-kesenjangan>.
- Statistik, B. P. (2018). Persentase penduduk miskin September 2017 mencapai 10,12 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.
- Statistik, B. P. (2018). Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi pada Maret 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/24/provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-pada-maret-2018>.
- Statistik, B. P. (n.d.). 50% pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi ditopang oleh Provinsi Sulawesi Selatan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/22/50-pertumbuhan-ekonomi-pulau-sulawesi-ditopang-oleh-provinsi-sulawesi-selatan>.
- Statistik, B. P. (n.d.). Seperti apa ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/25/seperti-apa-ketimpangan-pendapatan-per-kapita-kabupatenkota>.
- Trubus.id. (2017). 65 ribu warga Yogyakarta terancam kekurangan air bersih. <https://news.trubus.id/post/65-ribu-warga-yogyakarta-terancam-kekurangan-air-bersih-417>.
- Willets, P. (2011). What is a Non-Governmental Organization? Ireland: IHR Network.